

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanjungpinang merupakan Ibukota dari Provinsi Kepulauan Riau yang terdapat beberapa Kabupaten/Kota dan Pulau-Pulau Seperti, Pulau Dompok, Pulau Penyengat, Pulau Bintan dan Pulau-Pulau lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang kode dan data Wilayah administrasi pemerintah. Kabupaten Bintan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, dengan luas wilayah 1.318,21 kilometer persegi (Km²), terdiri dari 10 Kecamatan, 36 Desa, dan 15 Kelurahan. Jalan terluas adalah kawasan Telok Sepang dengan luas 285,27 kilometer persegi (Km²), dan jalan terkecil adalah kawasan Bintan Utara dengan luas 43,26 kilometer persegi (Km²), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Luas Wilayah, Jumlah Kelurahan dan Desa menurut Kecamatan.

| No | Kecamatan | Luas (km ²) | Luas Wilayah (%) | Kelurahan | Desa |
|-----|------------------|-------------------------|------------------|-----------|------|
| 1. | Gunung Kijang | 192,89 | 14,63 | 1 | 3 |
| 2. | Bintan Timur | 100,18 | 7,60 | 4 | 0 |
| 3. | Bintan Utara | 43,26 | 3,28 | 4 | 1 |
| 4. | Teluk bintang | 125,44 | 9,52 | 1 | 5 |
| 5. | Tambelan | 91,02 | 6,90 | 1 | 7 |
| 6. | Teluk Sebong | 285,72 | 21,67 | 1 | 6 |
| 7. | Toapaya | 176,48 | 13,39 | 1 | 3 |
| 8. | Mantang | 63,61 | 4,83 | 0 | 4 |
| 9. | Bintan Pesisir | 116,11 | 8,81 | 0 | 4 |
| 10. | Seri Kuala Lobam | 123,5 | 9,37 | 2 | 3 |
| | Total | 1,318,21 | 100 | 15 | 36 |

Sumber ; Badan Statistik (BPS) Kabupaten Bintan, 2021

Bintan pesisir adalah sebuah kecamatan yang ada di kabupaten bintan, kepulauan riau, indonesia, yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 7.075 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 3.688 jiwa dan perempuan sebanyak 3.387 jiwa. Bintan pesisir memiliki 4 Desa yaitu desa Air Glubi, Kelong, Mapur dan Numbing.

Desa Mapur merupakan salah satu Desa yang ada di Kabupaten Bintan sebuah kawasan pesisir Pulau Bintan. Secara geografis Desa Mapur terletak di antara garis lintang 006 garis lintang selatan 1034 garis lintang selatan dan garis bujur 1040 garis bujur 1080 garis bujur timur, dengan luas wilayah 484 kilometer persegi. Luas daratan 44 kilometer persegi, dan luas laut +440 kilometer persegi. Secara administratif, Desa Mapur terletak di sebelah utara Kabupaten Bintan yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Klun, sebelah barat dengan Pegunungan Kijang, dan sebelah timur dengan Laut Cina Selatan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Kabupaten Bintan diberi tugas “melaksanakan pembangunan ekonomi daerah berbasis pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan”. Sehubungan dengan amanat tersebut, pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Bintan mengutamakan:

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan untuk menjamin ketersediaan pangan dan bahan baku industri,
2. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan,
3. Meningkatkan nilai tambah, daya saing dan pemasaran hasil perikanan, dan
4. Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Ikan Masyarakat Nelayan.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia adalah ciri umum pada masyarakat pesisir di berbagai Wilayah Indonesia. Faktor ekonomi lah yang menyebabkan anak-anak kesulitan untuk bersekolah sehingga mereka harus bekerja untuk bisa bersekolah. banyak anak yang harus bekerja yang seharusnya masih duduk dibangku sekolah tidak menutup kemungkinan mereka sudah bekerja menjadi nelayan ketika masih usia sekolah, mereka bekerja untuk membantu orang tua untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pandangan dan persepsi masyarakat pesisir tentang dunia Pendidikan, hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan formal di masyarakat Pesisir tradisional Indonesia yang masih kurang dipahami Pentingnya pendidikan formal untuk masa depan. Begitu juga masyarakat pesisir Berpikir pendidikan formal tidak begitu penting dalam kehidupan, hal Hal ini diperparah dengan banyak dan beragamnya orang tua Ada alasan bagus mengapa mereka enggan menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan tertinggi, antara lain karena keterbatasan finansial pendidikan formal yang lebih tinggi. (Sumantri, 2019)

Dalam masyarakat, pendidikan berperan dalam mengubah masyarakat, dan kemajuan pendidikan didasarkan pada membawa perubahan dalam pemikiran manusia dan perilaku rasional. Dari perspektif teori peran pendidikan dalam proses perubahan, dapat dilihat dari perspektif struktur fungsional, yang didasarkan pada peran aktif pendidikan dalam mendukung tatanan sosial. (Rahmawati Aminah Dewi, 2022)

Pendidikan adalah salah satu cara untuk memastikan dan meningkatkan Aspek ekonomi dan sosial dari kualitas hidup manusia. Dan berbagai cara di mana

ketimpangan dapat diatasi untuk bekerja menuju kesetaraan dan kehidupan yang berkelimpahan. Jika produktivitas manusia lemah, masyarakat tidak akan makmur. Komitmen pemerintah terhadap pendidikan tertuang dalam UU No.1. Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Bab IV bagian 1 Tahun 2003 Pasal 5 yang salah satunya menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas Kesempatan untuk mempromosikan pendidikan sepanjang hayat. demikian Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Percepatan Gerakan Nasional Menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun dan memberantas buta huruf. Terlihat bahwa jalan mencerdaskan masyarakat memiliki arti strategis dan penting. (Nur Fauziah, 2018)

Menurut John S.Brubachaer Pendidikan dapat dipahami sebagai proses adaptasi timbal balik seseorang terhadap orang lain dan lingkungannya. (Wahab et al., 2021).

Pendidikan pada dasarnya merupakan perubahan perilaku seseorang atau kelompok orang dalam perjuangan mendewasakan insan melalui upaya pengajaran dan pembinaan. Secara esensi tujuan Pendidikan menjadi pembentukan manusia yang hanya bukan dapat menyesuaikan diri, hayati dalam masyarakat melainkan, lebih asal itu yang bagaimana mampu menyumbang perubahan bagi masyarakat serta memiliki sebagai orang penyeimbang masyarakat. Adapun penyebab yang mengakibatkan melek pendidikan di daerah ini rendah dikarenakan oleh kurangnya pengawasan, motivasi, dan lingkungan sekitar. Dalam hal pengawasan dan motivasi terhadap anak harusnya tugas orang tua karena pertama kali anak mendapat Pendidikan itu dari keluarga dan dari situ orang tua harus bijak membagi waktu untuk mengawasi anak dan memberikan perhatian lebih semasa pendidikannya. Agar

anak tidak mudah pengaruh lingkungan sekitar dan memiliki kepribadian dan pendirian kuat atas apa yang diberikan keluarga di rumah. Tetapi hal ini tidak ada sama sekali dilakukan orang tua sehingga mental dan karakter anak tidak tumbuh dengan baik. Sehingga dampaknya anak melampiaskan ke hal buruk seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan menghabiskan waktu di luar rumah dengan kegiatan-kegiatan yang kurang baik bagi masa depan mereka. (Tarigan F Wahyu et al., 2022).

Tujuan dilaksanakannya pembangunan pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, gelar tertinggi pendidikan publik. Apa ini Meningkatkan daya saing daerah. nilai Pendidikan yang baik diukur dengan beberapa indikator. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, Pendidikan dibagi menjadi 6 sub layanan pembangunan Pendidikan, (1) Subbidang Manajemen Pendidikan, (2) Divisi Kursus, (3) Divisi Urusan Akreditasi, (4) Subbidang Pendidikan dan Kepegawaian Pendidikan, (5) Subbidang Perizinan Pendidikan, dan (6) Subbidang Urusan bahasa dan sastra.

Prestasi Kerja Wajib Belajar di Tahun 2020 masih bagus, dapat dilihat dari 20 indikator, 4 proyek sebagai ukuran. 11 indikator tidak terpenuhi dan persentase dibawah 100%, 6 indikator tidak terpenuhi Tujuan 2020 telah tercapai dan beberapa pencapaian telah di capai Lebih dari 100%. Indikator tidak memenuhi target tahunan 2020, GER PAUD 3-6 tahun, Rasio Siswa-Guru PAUD, APM SD/MI/SLB/Paket A, APK SMP/MTs/Paket B, Angka Putus Sekolah Dasar, Angka Partisipasi Murni Putri dan SD Anak perempuan, Rata-rata lama sekolah (RLS), % Guru TK dengan sertifikasi profesi, % Guru SD dengan sertifikasi profesi, % Guru

SLTP dengan sertifikasi profesi dan guru berkualifikasi S1/D-IV, % dengan sertifikasi minimal B dan SD/MI Persentase SMP dengan setidaknya sertifikasi Level B.

Tabel 1.2 Capaian Indikator Urusan Pendidikan di Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020

| No | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Relasi Kinerja | | | Ket |
|----|---|--------|----------------|-------|-------|--|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | Urusan |
| 1 | Jumlah warga usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/Mts) | % | 105,68 | 98,27 | 96,44 | SPM/IKK/ Permendagri 17/2021 |
| 2 | Jumlah warga usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang partisipasi dalam Pendidikan kesetaraan | % | NA | 92,35 | 92,35 | SPM/IKK/ Permendagri 17/2021 |
| 3 | Tingkat partisipasi warga usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar | % | NA | NA | 82 | IKK (Indikator Kinerja Kunci) |
| 4 | Tingkat partisipasi warga usia 13 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama | % | NA | NA | 67 | IKK (Indikator Kinerja Kunci) |

Sumber; RPJMD Kabupaten Bintan, 2021-2026

Tiga Standar Minimum Layanan Pendidikan Indikatornya adalah jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang mengikuti pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) Skor tahun 2018 adalah 105,68%, tahun 2019 adalah 98,27 dan tahun 2020 adalah 96,44%. jumlah warga negara Negara untuk anak usia 7-18 tahun yang belum tamat

sekolah Sekolah Dasar dan/atau Menengah yang Mengikuti Pendidikan di tahun 2018 tidak memiliki data, di tahun 2019 adalah 92,35, dan pada tahun 2020 92,35%. SPM pendidikan tidak sesuai target, ini yang terjadi Ada beberapa alasan, pertama karena orang tua tidak mengizinkan Anak-anak mereka bersekolah, yang kedua siswa tidak Memiliki keinginan untuk bersekolah.

Namun di lihat dari keadaan Pendidikan yang ada di Desa Mapur bahwasanya pendidikan yang ada di Desa Mapur khususnya tingkat SD dan SMP di Mapur masih minim, belum memiliki fasilitas yang baik. Selain fasilitas yang menjadi alasan, kesadaran orang tua dan juga anak-anaknya sangat minim terhadap pentingnya Pendidikan, maka diperlukan peran dari Dinas Pendidikan untuk lebih memperhatikan Pendidikan di desa tersebut.

Kondisi bangunan sekolah yang ada di desa mapur terbilang sangat memenuhi standar hanya saja bangun kantin yang masih di luar lingkungan sekolah yang mengkhawatirkan pada siswa untuk cabut saat jam Pelajaran. dan juga sarana dan prasana yang telah di sediakan sudah bagus hanya saja karena akses listrik yang belum masuk ke sekolah tersebut sehingga para siswa hanya belajar secara teori tanpa ada sentuhan dari metode tambahan yang pada dasarnya para guru sangat menginginkan para siswa untuk bisa belajar menggunakan infocus dan berbagai metode yang ada hanya saja kondisi listrik yang tidak memungkinkan ini yang membuat pada tenaga pendidik berharap agar cepat nya masuk aliran listrik yang memadai. Adapun kondisi alat transportasi untuk guru dan siswa, karena pada dasar tenaga pendidik yang mengajar di desa ini tidak berasal dari desa itu sendiri, sehingga para tenaga pendidik menggunakan alat transportasi yang di sediakan, dan

alat transportasi sudah terbilang bagus hanya saja jadwal keberangkatan alat transportasi tersebut tidak berjalan setiap hari, dan juga para tenaga pendidik ketika berpergian menggunakan dana pribadi.

Kultur Pendidikan dari zaman ke zaman baik terjadi yang di desa atau pun di kota mempunyai kesamaan utamanya dalam hal penelitian tentunya. Adapun metode yang dikembangkan dalam dunia pendidikan dan pelatihan terhadap masyarakat menerima pikiran *positive* seperti objektivitas, empiris, yang tidak memihak pada peserta, yang berjarak dengan objek belajar, rasional dan bebas nilai, sehingga banyak fasilitator yang sesungguhnya justru berperan menjadi penghambat proses pembebasan dan ikut serta pula untuk menumpas benih-benih watak emansipatoris pada setiap proses Pendidikan dan pelatihan (Nur, n.d.).

Dalam melaksanakan pendidikan tentu saja bukan mengutamakan penanaman semata melainkan menumbuhkan karakter bangsa yang di maksud juga telah diatur di dalam undang-undang negara Indonesia. Yang mana hal ini dilakukan gunakan memberikan arah terhadap pelaksanaan dan perkembangan pendidikan di Indonesia untuk masa yang akan datang. Yang mana dengan demikian Pendidikan di Indonesia dapat memberikan kontribusi yang jelas terhadap masyarakat dan Negara Indonesia. Di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional, telah diatur terkait arah dan cara pelaksanaan pendidikan nasional. Dengan tujuan dan fungsi pendidikan yang telah terurai di dalam undang-undang tersebut arah pendidikan dapat terlihat secara jelas bahwa pendidikan di Indonesia bertujuan untuk mempersiapkan generasi bangsa yang lebih baik.

Adapun fungsi dan tujuan pendidikan di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang di dalam undang-undang tersebut memuat segala hal yang berkaitan dengan melaksanakan pendidikan nasional di Indonesia yang meliputi dari pengertian pendidikan, jenis-jenis pendidikan, jenjang pendidikan standart pendidikan dan lain sebagainya. Dengan demikian arah Pendidikan di Indonesia sudah ditentukan dengan sedemikian rupa (Wayan I Cong Sajuna, 2019).

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor : 1 Tahun 2018 Pasal 13 ayat (1) Dinas melakukan pengelolaan pendidikan di daerah serta merumuskan dan/atau menetapkan kebijakan teknis pendidikan di Daerah, pada Pasal 17 Dinas Pendidikan memastikan pengelolaan pendidikan daerah dan menyusun atau menetapkan kebijakan teknis daerah, menjamin pengarah, supervisi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pengembangan serta melaksanakan kebijakan teknis pendidikan pada tingkat manajemen pendidikan, satuan pengajaran, peta jalan pendidikan , tingkat pengajaran dan jenis pengajaran sesuai dengan kebijakan pendidikan daerah.

Adapun tugas dan fungsi Dinas Pendidikan atau penyelenggara pendidikan yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor: 1 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Penyelenggara Pendidikan bertujuan untuk menjamin:

1. Akses masyarakat atas pelayanan Pendidikan dasar yang mencukupi, merata, dan terjangkau.
2. Mutu dan relevansi dengan kebutuhan dan/atau kondisi Masyarakat.
3. Akuntabilitas penyelenggara pendidikan.
4. Keharmonisan dan keseimbangan serta interaksi yang optimal dari unsur-unsur esensial Pendidikan.
5. Efektivitas dan efisiensi operasional Pendidikan.

Penyelenggara Pendidikan berfungsi untuk:

1. Menyediakan secara optimal sumber daya dan proses pembelajaran untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Menetapkan arah kebijakan dan membantu keputusan-keputusan yang sesuai bagi penyediaan pendidikan di daerah.
3. Mengharmoniskan lingkungan pendidikan guna memenuhi kekuatan dan keterpaduan nilai dan norma pendidikan di daerah.
4. Mengembangkan model-model pembelajaran dan transfer nilai keilmuan dan teknologi secara demokratis.

Melihat tujuan utama penyelenggaraan pendidikan untuk menjamin akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dasar yang memadai, adil dan terjangkau, Desa Mapur masih melihat masyarakat tidak bersekolah, selain semakin kurangnya dukungan layanan dan infrastruktur pertanyaan sebagai “Peran Lembaga Pembelajaran dalam Mengatasi Kesenjangan Pendidikan Masyarakat Pesisir di Desa Mapur, Kecamatan Bintang Pesir, Kabupaten Bintang”.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan melihat permasalahan yang ada, peneliti dapat merumuskan masalah yaitu “Bagaimana Peran Dinas Pendidikan dalam Menangani Kesenjangan Pendidikan Masyarakat Pesisir di Desa Mapur, Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tentunya dalam setiap penelitian terdapat tujuan tertulisnya, berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui “Peranan layanan pendidikan dalam mengelola kesenjangan pendidikan” pendidikan pada masyarakat pesisir desa Mapur Bintan Kabupaten Pesisir, Bupati Bintan”.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan ini mempunyai manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai kesenjangan pendidikan, khususnya di wilayah Desa Mapur, Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan. Melalui penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi di bidang Ilmu Pemerintahan serta menjadi bahan masukan bagi peneliti yang mempunyai kesamaan permasalahan.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan penulis dalam mengetahui kesenjangan pendidikan yang berada di Desa Mapur. Selain itu juga untuk meningkatkan penalaran dalam bentuk pola pikir yang dinamis serta mengaplikasikan ilmu yang diperoleh oleh penulis selama masa studi di Universitas Maritim Raja Ali Haji

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi pemerintah Kota Tanjungpinang dalam permasalahan kesenjangan pendidikan di Kota Tanjungpinang khususnya di Pulau-Pulau kecil, terutama dalam mengeluarkan kebijakan.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberi pengetahuan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pesisir bahwasannya masyarakat memiliki peran penting terutama orang tua, dalam menudukung pendidikan anak.